

Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan

Paiman Raharjo

**Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)**

Email : paimanraharjo@dsn.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kebayoran Lama. Untuk memperoleh data ini menggunakan tehnik wawancara, studi pustaka serta observasi terjun langsung kelapangan. Data yang diperoleh dari lapangan akan diolah sesuai dengan kebutuhan yang akan dianalisis dengan teori-teori yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Pasar Kebayoran Lama. Berdasarkan melalui analisis dimensi pencapaian kejelasan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis & perumusan kebijakan, rencana yang matang, pelaksanaan yang efektif & efisien, penyusunan program sarana & prasarana kerja dan system pengawasan & pengendalian dengan mewawancarai para nara sumber yang telah dipilih pada dasarnya penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan cukup efektif, karena rata-rata dari hasil wawancara yang diperoleh sebagian besar menyatakan bahwa penertiban pedagang kaki lima memberikan dukungan yang berdampak positif dilihat lingkungan menjadi teratur bersih, rapi, nyaman dan trotoar atau jalanan yang semula mengakibatkan kemacetan sebelum diberlakukannya penertiban pada jam yang ditentukan dan setelah ditertibkan kembali pada fungsinya semula, para pejalan kaki atau kendaraan lain dapat melintasi trotoar sebagai jalan setapak, dan jalanan menjadi lancar tidak macet karena jalanan menjadi lebar kembali.

Kata Kunci : *efektifitas, penertiban, pedagang kaki lima*

ABSTRACT

This study aims to find out how the Effectiveness of Street Vendor (PKL) in Kebayoran Lama Market City South Of Jakarta Administration. This research uses qualitative research methods and uses descriptive research type because the purpose of this study is to describe the effectiveness of street vendor (PKL) in Kebayoran Lama market, City South of Jakarta administration. To obtain this data using interview techniques, literature study and observation directly jump into space. The data obtained from the field will be processed in accordance with the needs to be analyzed with theories related to the research. The results showed that the effectiveness of curbing street vendors in Kebayoran Lama market. Based on the analysis of the dimensions of the achievement of clarity to be achieved, the clarity of goal achievement strategy, the process of policy analysis & formulation, the mature plan, the effective & efficient implementation, the preparation of facilities & infrastructure and supervision & control system by interviewing the selected resource persons basically the curbing of street hawkers is done quite

effectively, because the average of the interviews obtained largely stated that curbing street vendors provide support that positively impacted the environment to be regular clean, neat, comfortable and sidewalks or streets that originally resulted in congestion before the enactment of the curbing at the appointed hour and after being restored to its original function, the pedestrians or other vehicles can cross the sidewalk as the path, and the road becomes smoothly not jammed because the streets become wide again.

Keywords : *Keyword: effectiveness, controlling, street vendor*

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota jakarta yang tertib, nyaman, tentram, bersih dan indah diperlukan adanya pengaturan dibidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota dan beserta kelengkapannya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah nomor 11 tahun 1998 tentang ketertiban umum dalam wilayah daerah khusus ibukota jakarta sudah tidak sesuai lagi dengan penyelenggaraan pemerintah daerah serta perubahan dan perkembangan tata nilai kehidupan bermasyarakat warga kota jakarta. Maka itu, pemerintah daerah mengeluarkan regulasi baru yaitu peraturan daerah dki jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum salah satunya penertiban pedagang kaki lima. Menuntut

perubahan yang harus ditingkatkan dalam Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menjadikan Jakarta harus modern, layak huni, manusiawi dan tertata rapi.

Pedagang kaki lima (*street vendor/street hawker*) adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Sektor informal dikenal juga dengan 'ekonomi bawah tanah' (*underground economy*). Menurut Hidayat (2010:17), sektor informal diartikan sebagai unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah. Sektor informal ini umumnya berupa usaha berskala kecil, dengan modal, ruang lingkup, dan pengembangan yang terbatas. Sektor informal muncul dalam kegiatan perdagangan yang bersifat kompleks yang menyangkut jenis barang, tata ruang, dan waktu.

Lokasi pedagang kaki lima sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha para pedagang kaki lima, yang pada waktunya akan mempengaruhi pula volume penjualan dan

tingkat keuntungan dari pedagang tersebut. Pasar Kebayoran Lama menjadi fenomena yang dipilih melihat pasar yang berlokasi strategis di daerah Jakarta Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kelurahan Grogol Selatan memiliki penduduk sebanyak 29.041 jiwa dan luas 1,95 km² serta kepadatan 14.893 km² dengan akses yang memadai salah satunya transportasi stasiun Kebayoran Lama yang berdekatan dengan pasar Kebayoran Lama memudahkan akses perjalanan menggunakan KAI Commuter yang melayani area Jabodetabek. Sehingga dengan kemudahan akses dan ketersediaan moda transportasi umum menjadi factor pendukung utama para pedagang luar area Jakarta pun berdagang disepanjang trotoar pasar Kebayoran Lama yang menimbulkan kemacetan.

Namun, karena selama ini perencanaan ruang kota hanya dibatasi pada ruang-ruang formal saja sedangkan ruang untuk kegiatan informal tidak direncanakan, maka PKL menggunakan ruang publik yang ada di sekitar kawasan perkantoran tersebut dalam melakukan aktivitasnya. Penggunaan ruang publik oleh PKL tersebut seharusnya dapat ditertibkan, salah satunya adalah dengan tindakan relokasi.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan mengambil lokasi penelitian

pedagang kaki lima (PKL) di pasar Kebayoran Lama. Pada penertiban dan penanganan pedagang kaki lima di wilayah Pasar Kebayoran Lama ini mengalami berbagai hambatan dan kendala seperti : 1) Minimnya lahan untuk merelokasi memindahkan para pedagang kaki dari jalanan ke tempat yang lebih layak dan nyaman; 2) Koordinasi dalam penanganan pedagang kaki lima pada Pasar Kebayoran Lama belum berjalan dengan baik; 3) Tingkat efektivitas penanganan pedagang kaki lima di Kecamatan Kebayoran Lama belum dapat dicapai secara optimal.

KERANGKA ANALISIS

Penelitian ini dengan judul Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kebayoran Lama maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan efektifitas penertiban. menurut S.P Siagian, (2008:77), tingkat efektivitas dapat dikaji dari beberapa sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dilihat dari sudut produktivitas, maka seorang manager produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

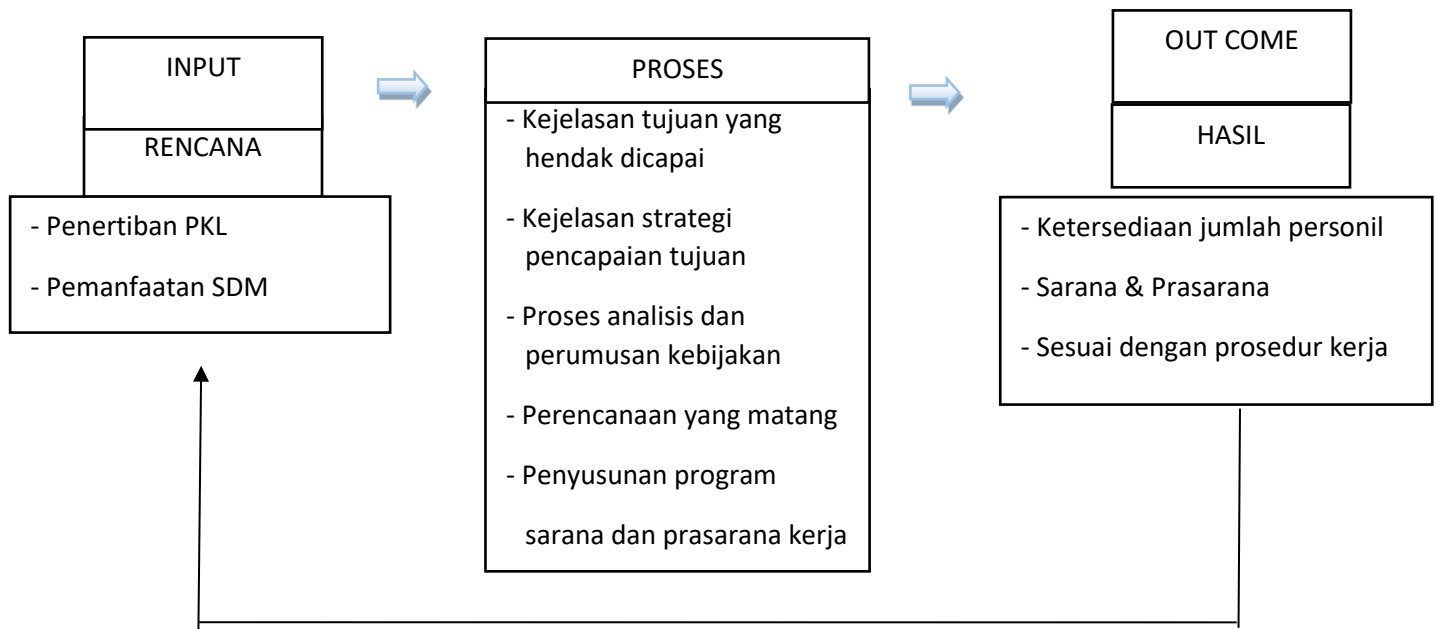
Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak yaitu dengan; 1) Kejelasan tujuan

yang hendak dicapai, 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan, 4) Perencanaan yang matang, 5) Penyusunan program yang tepat, 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, 7)

Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti alur sebagai berikut:

Gambar 2.1.

Alur Berpikir



(Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima)

Sumber : S.P Siagian, (2008:77)

METODE PENELITIAN

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian Pada Kecamatan & Kelurahan Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September s/d Oktober 2017.

2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Djarm'an Satori (2011: 23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses

suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

A. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam teknik pengumpulan data digunakan dengan dua cara yaitu melalui pengumpulan data primer dan sekunder.

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui :

- 1) observasi, yaitu pengamatan langsung ke obyek penelitian, dan 2) wawancara, yakni melakukan interview kepada sumber data/informan yang memiliki informasi terkait data yang dibutuhkan peneliti.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data melalui satu teknik riset Perpustakaan (library research)

untuk melengkapi data primer yang telah penulis dapatkan dari riset lapangan, maka penulis juga mengambil data sekunder dari berbagai sumber antara lain buku-buku, literatur, bahan kuliah dan majalah-majalah yang berhubungan dengan objek penelitian.

B. TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang diperoleh melalui penelitian, dikelompokkan, di klasifikasikan, ditabulasikan dan dianalisis menggunakan metode deskripsi. Sehubungan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka analisis data dilakukan secara keseluruhan dan sistematis bersamaan dengan pengumpulan data berdasarkan dengan satuan-satuan gejala yang diteliti. Miles and Huberman (Sugiyono 2010), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan Conclusion Drawing / Verification.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data (menyajikan data), penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat *naratif*. Dengan mendisplay data (menyajikan data), maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.

3. *Conclusion*

Drawing/verification (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif

menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan.

1. TUJUAN YANG HENDAK DICAPAI

Dalam penelitian ini mencoba mengetahui sejauh mana efektifitas penertiban pedagang kaki lima yang hendak dicapai. Serta, memberikan pemahaman terhadap pedagang kaki lima yang dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Dalam Wawancara dengan Key Informan ; Bapak Sayid Ali Selaku Camat Kebayoran Lama , yang ditanyakan Bagaimana tingkat efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan

Kebayoran Lama jika dilihat dari kejelasan tujuan hendak dicapai?

- a. Terlaksananya penataan pedagang kaki lima yang terkendali dan terciptanya kenyamanan dengan memberikan pemahaman masyarakat terhadap ketertiban dan keindahan lingkungan bukanlah hal yang mudah sehingga Camat & Lurah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk sering dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Dan Suatu hal yang harus dilakukan yang mana menjadi tujuan akhir dengan memberikan tempat untuk berjualan dengan lahan yang kurang memadai sehingga tingkat Provinsi DKI Jakarta, Kecamatan & Kelurahan sedang mengusahakan untuk pembebasan lahan 8000 m² yang akan direalisasikan dalam waktu dekat.

Dan Wawancara dengan Informan ; Bapak Margiono Selaku Kepala Koordinasi Lapangan Satpol PP, yang ditanyakan Bagaimana tingkat efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan

Kebayoran Lama jika dilihat dari kejelasan tujuan hendak dicapai?

- a. Bahwa Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan harus sering dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Para pedagang yang ditertiban di data, kemudian diberikan arahan dan pembinaan lebih lanjut serta dioptimalkan penjagaan di area pasar Kebayoran Lama.

Dan Wawancara dengan Informan: Bapak Yono Selaku pedagang kaki lima (PKL) dan Ibu Lisna Selaku Pembeli dipasar Kebayoran Lama, yang ditanyakan Bagaimana tingkat efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Kebayoran Lama jika dilihat dari kejelasan tujuan hendak dicapai?

- a. Penertiban yang dilakukan oleh pemerintah dirasakan kurang sosialisasi, sehingga menimbulkan keresahan dan kegaduhan bahkan terjadi bentrokan. Seharusnya sebelum dilakukan pembongkaran atau penertiban aparat melakukan pendekatan secara persuasive, dan sosialisasi yang cukup. Serta, Pembeli

mengungkapkan bahwa di Pasar Kebayoran Lama dengan cara merelokasi pedagang kaki lima merupakan suatu tindakan yang seharusnya dikembalikan sebagai fungsi ruang publik.

2. KEJELASAN STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN

Dalam penelitian ini mencoba mengetahui sejauh mana efektifitas penertiban pedagang kaki lima dalam kejelasan strategi pencapaian tujuan tentunya menjadi *factor* yang paling penting. Dikarenakan, diharapkan menjadi solusi dengan kejelasan bagi pedagang kaki lima di pasar Kebayoran Lama didalam hal ini mengupaya adanya alokasi lahan untuk usaha sector informal.

Dalam Wawancara dengan Key Informan ; Bapak Sayid Ali Selaku Camat Kebayoran Lama, yang ditanyakan Bagaimana tingkat efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Kebayoran Lama jika dilihat dari kejelasan strategi pencapaian tujuan?

- a. Strategi pencapaian tujuan di Pasar Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, dalam menciptakan ketertiban dan keindahan serta

meningkatkan kesadaran masyarakat, Maka, Camat, Lurah, RW 01 setempat dan Satpol PP bekerjasama dapat dilihat aparat Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima berkomunikasi dengan memberikan arahan dan Pembina dengan diberlakukan aturan jam waktu berdagang dari jam 18.00 PM s.d 06.00 AM serta, pendataan bagi pedagang serta berlakunya sanksi apabila pedagang kaki lima yang bandel sanksi barang tidak dikembalikan. Maka, dalam langkah ini dinilai efektif, karena para pedagang kaki lima beberapa bulan kapok dan tidak berani berjualan kembali di tempat-tempat yang dilarang.

Dan Wawancara dengan Informan ; Bapak Margiono Selaku Kepala Koordinasi Lapangan Satpol PP, yang ditanyakan Bagaimana tingkat efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Kebayoran Lama jika dilihat dari kejelasan strategi pencapaian tujuan?

- a. Bahwa penertiban pedagang kaki lima harus sering dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan.

Untuk aturan yang diadakan pihak camat dan kelurahan Aparatur Satpol PP bertugas bahwa para pedagang yang ditertiban di data sesuai tempat berdagang, kemudian diberikan arahan dan pembinaan lebih lanjut. Bagi pedagang kaki lima yang bandel, sudah berkali kali ditertibkan tetapi tidak berubah, maka diberikan sanksi barang dagangannya tidak dikembalikan.

Dan Wawancara dengan Informan : Bapak Yono Selaku pedagang kaki lima (PKL) dan Ibu Lisna Selaku Pembeli dipasar Kebayoran Lama, yang ditanyakan Bagaimana tingkat efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Kebayoran Lama jika dilihat dari kejelasan strategi pencapaian tujuan?

- a. Penertiban yang dilakukan oleh pemerintah merasa akan memberikan dampak nilai ekonomis menurunnya penghasilan para pedagang kaki lima. Dan hanya mengikuti informasi dan menunggu lahan yang memadai untuk berjualan sehingga mengurangi bentrokan dengan aparat Satpol PP dan jajarannya.

Serta, pembeli mengungkapkan merasakan selain mengembalikan fungsi ruang *public* serta tidak diimbangi ketidakjelasan tempat pedagang kaki lima berjualan sehingga merasa kehilangan langganan yang dinilai dari segi harga lebih ekonomis dsb.

3. PROSES ANALISIS & PERUMUSAN KEBIJAKAN

Dalam penelitian ini mencoba mengetahui sejauh mana efektivitas penertiban pedagang kaki lima dalam proses analisis & perumusan kebijakan yang mengacu pada Ketertiban umum pelaksanaan yang mendukung proses dan kebijakannya seringkali berasumsi atas kepentingan rakyat. Maka, pemerintah mengacu oleh Perda Nomor 8 Tahun 2007 pasal 25 dimana salah satunya “setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha dibagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyebrangan jalan & tempat kepentingan umum lainnya diluar ketentuan”.

Dalam Wawancara dengan Key Informan ; Bapak Sayid Ali Selaku Camat di Kebayoran Lama, yang ditanyakan Bagaimana tingkat efektivitas

penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Kebayoran Lama jika dilihat dari Proses Analisis & Perumusan Kebijakan?

- a. Dengan berkoordinasi dengan Lurah, RW 01 Setempat dan Satpol PP melaksanakan perda nomor 8 tahun 2007 yang mana satpol PP bertugas mengamankan/mengawasi asset pemda DKI dan ingin mengembalikan hak ke masyarakat. Oleh karena itu, Camat, Lurah dan Satpol PP berperan penting dan memiliki tanggungjawab penuh dalam penertiban di pasar Kebayoran Lama yang mana seringkali tidak mematuhi aturan yaitu tidak boleh berjualan di badan jalan. Maka, langkah ini dinilai sesuai prosedur dan mekanisme meski seringkali kenyataannya masih banyak pedagang yang masih berjualan di area yang dilarang.

Dan Wawancara dengan Informan ; Bapak Margiono Selaku Kepala Koordinasi Lapangan Satpol PP, yang ditanyakan Bagaimana tingkat efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Kebayoran Lama jika dilihat dari

Proses Analisis & Perumusan Kebijakan?

- a. Satpol PP melaksanakan perda nomor 8 tahun 2007 yang mana satpol PP bertugas mengamankan/mengawasi asset pemda DKI dan ingin mengembalikan hak ke masyarakat terhadap ketidak nyamanan atau terenggut haknya untuk berjalan kaki di atas trotoar, karena telah dipenuhi oleh PKL yang menjajakan berbagai barang dagangannya berjualan di jalan trotoar.

Dan Wawancara dengan Informan : Bapak Yono Selaku pedagang kaki lima (PKL) dan Ibu Lisna Selaku pembeli di Pasar Kebayoran Lama, yang ditanyakan Bagaimana tingkat efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Kebayoran Lama jika dilihat dari Proses Analisis & Perumusan Kebijakan?

- a. Penertiban yang dilakukan oleh pemerintah dirasakan kurang sosialisasi, sehingga terkadang menimbulkan keresahan yang membuat para pedagang kaki lima was-

was. Akan tetapi, dari aspek sosialisasi ditingkatkan agar tidak terjadi komunikasi yang baik antara aparat Satpol PP dengan pedagang kaki lima. Serta, Pembeli mengungkapkan Kebijakan publik didasarkan pada kepentingan masyarakat yang diimbangi dengan atensi terhadap kaum minoritas dalam masyarakat. Serta, dapat dikomunikasikan secara interaktif antara pihak PKL dan Aparatur pemerintah di Pasar Kebayoran Lama (Satpol PP) mengenai kebijakan yang akan dilaksanakan.

4. RENCANA YANG MATANG

Dalam penelitian ini mencoba mengetahui sejauh mana efektifitas penertiban pedagang kaki lima dari keseluruhan proses pemikiran dan penetapan dengan hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan itu sebagian adalah dari proses rencana yang matang.

Dalam Wawancara dengan Key Informan ; Bapak Sayid Ali Selaku Camat Kebayoran Lama, yang ditanyakan Bagaimana tingkat efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan

Kebayoran Lama jika dilihat dari dimensi rencana yang matang?

- a. Sesuai dengan motto di kecamatan Kebayoran Lama yaitu “berhias” (bersih, hijau, asri dan sehat). Camat, Lurah, RW setempat & Satpol PP berupaya dalam rencana untuk mengusulkan adanya rencana pembebasan alokasi lahan sekitar 8000 m untuk pedagang kaki lima itu kalau sudah mempersiapkan untuk para pedagang oleh Dinas UKM. Sehingga, diharapkan dengan pembebasan lahan yang akan disegerakan akan memberikan dampak yang sangat positif. Hal ini terlihat lingkungan semakin bersih dan nyaman, titik-titik yang dijadikan tempat pangkalan PKL, lambat laun mulai berkurang dan beralih fungsi menjadi lahan pengijauan dan kembali sebagai fungsi semula.

Dan Wawancara dengan Informan ; Bapak Margiono Selaku Kepala Koordinasi Lapangan Satpol PP, yang ditanyakan Bagaimana tingkat efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Kebayoran Lama jika dilihat dari dimensi rencana yang matang?

- a. Bahwa penertiban pedagang kaki lima kegiatan yang dilakukan dengan adanya SOP (standar operational) bersosialisasi dengan program-program Pemda/PemProv DKI serta koordinasi dengan kepala wilayah setempat.

Dan Wawancara dengan Informan : Bapak Yono Selaku pedagang kaki lima (PKL) dan Ibu Lisna Selaku Pembeli di Pasar Kebayoran Lama, yang ditanyakan Bagaimana tingkat efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Kebayoran Lama jika dilihat dari dimensi rencana yang matang?

- a. Bahwa penertiban yang dilakukan oleh pemerintah secara responsivitas menunjuk kepada kepentingan masyarakat khususnya, pedagang kaki lima dalam rencana penempatan berdagang yang akan disediakan sebaiknya tidak mempengaruhi pada tingkat penghasilan. Serta, Pembeli mengungkapkan dalam rencana yang matang ini dalam perdagangan dapat memberikan respon yang positif terhadap perubahan yang dilakukan.

5. PELAKSANAAN YANG EFEKTIF & EFISIEN

Dalam penelitian ini mencoba mengetahui sejauh mana efektifitas penertiban pedagang kaki lima yang mengukur tingkat kinerja yang efektif dan efisien pada umumnya sebagai salah satu nilai indikator kinerja yang penting dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima.

Dalam Wawancara dengan Key Informan ; Bapak Sayid Ali Selaku Camat Kebayoran Lama Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di pasar Kebayoran Lama, yang ditanyakan Bagaimana tingkat efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Kebayoran Lama jika dilihat dari dimensi Pelaksanaan yang Efektif & Efisien?

- a. Dapat dilihat dari bagaimana program pelaksanaan terkait dalam penertiban PKL yang hendak dicapai serta terealisasi yang ditemui dilapangan. Adapun pelaksanaan yang dilakukan Camat dan Lurah terhadap Satpol PP Kebayoran Lama dengan (1) adanya pembagian kinerja satpol PP (2) sosialisasi & pembinaan dengan membentuk tim

operasional lapangan dan, (3) pembagian tugas bagi pelaksana sesuai dengan SOP (standar Operational) dan berkoordinasi dengan RW 01 setempat.

Dan Wawancara dengan Informan ; Bapak Margiono Selaku Kepala Koordinasi Lapangan Satpol PP, yang ditanyakan Bagaimana tingkat efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Kebayoran Lama jika dilihat dari dimensi Pelaksanaan yang Efektif & Efisien?

- a. Bahwa untuk pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan disediakan kendaraan operasional untuk kecamatan ada 4 mobil panther lebihnya 2 truck dan 2 truck kerangkeng dan masing-masing kelurahan ada kendaraan dinas. Namun, dalam hal ini jumlah personil yang dinilai kurang mempengaruhi pembagian kinerja yang seharusnya.

Dan Wawancara dengan Informan : Bapak Yono Selaku pedagang kaki lima (PKL) dan Ibu Lisna Selaku Pembeli dipasar Kebayoran Lama, yang ditanyakan Bagaimana tingkat

efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Kebayoran Lama jika dilihat dari dimensi Pelaksanaan yang Efektif & Efisien?

- a. Penertiban yang dilakukan oleh pemerintah bahwa pada dasarnya dilakukan sesuai prosedur yang benar, namun untuk pelaksanaannya yang efektif & efisien hendaknya para aparat Satpol PP & jajarannya untuk memperjuangkan tempat/lahan para pedagang. Serta, Pembeli mengungkapkan Pemerintah memberi kontribusi terhadap peningkatan jumlah pengangguran yang pada umumnya bermukim di Wilayah Perkotaan dan memprioritaskan tempat yang layak dan strategis.

6. PENYUSUNAN PROGRAM SARANA & PRASARANA KERJA

Dalam penelitian ini mencoba mengetahui sejauh mana efektivitas penertiban pedagang kaki lima berupaya melaksanakan penertiban pedagang kaki lima merupakan *factor* yang penting dalam mendukung terlaksananya penertiban. Sehingga, diperlukan standarisasi dalam kegiatan efektivitas sarana & prasarana kerja.

Dalam Wawancara dengan Key Informan ; Bapak Sayid Ali Selaku Camat Kebayoran Lama Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di pasar Kebayoran Lama, yang ditanyakan Bagaimana tingkat efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Kebayoran Lama jika dilihat dari dimensi Penyusunan Program Sarana & Prasarana Kerja?

- a. Dapat dilihat dari program pemerintah yang dilakukan Camat, Lurah, RW setempat & Satpol PP berkoordinasi membuat salah satu program dalam mengurangi pedagang kaki lima yang berdagang disepanjang trotoar area pasar. Maka, dilakukan pembinaan usaha kredit untuk kios-kios daerah setempat agar terpakai oleh PKL serta pembagian tempat yang di tentukan. Sejauh ini, di dalam kinerja Satpol PP di Pasar Kebayoran Lama sudah memadai dengan alat transportasi dan tempat yang disediakan. Namun, dalam hal ini jumlah personil yang dinilai kurang mempengaruhi pembagian kinerja yang seharusnya.

Dan Wawancara dengan Informan ; Bapak Margiono Selaku Kepala Koordinasi Lapangan Satpol PP, yang ditanyakan Bagaimana tingkat

efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Kebayoran Lama jika dilihat dari dimensi Pelaksanaan yang Efektif & Efisien?

- a. Bahwa untuk pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan disediakan kendaraan operasional untuk kecamatan ada 4 mobil panther lebihnya 2 truck dan 2 truck kerangkeng dan masing-masing kelurahan ada kendaraan dinas. Namun, dalam hal ini jumlah personil yang dinilai kurang mempengaruhi pembagian kinerja yang seharusnya.

Dan Wawancara dengan Informan : Bapak Yono Selaku pedagang kaki lima (PKL) dan Ibu Lisna Selaku Pembeli dipasar Kebayoran Lama, yang ditanyakan Bagaimana tingkat efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Kebayoran Lama jika dilihat dari dimensi Pelaksanaan yang Sarana & Prasarana?

- a. penertiban yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya telah dilakukan sesuai prosedur yang benar, namun dalam sarana & prasarana kerja pedagang kaki lima menuntut sarana dan fasilitas usaha lokasi sementara Usaha Mikro

Pedagang Kaki Lima terdiri yang mana terdiri dari tempat usaha terbuka, setengah terbuka atau tertutup, listrik, tempat sampah dan papan nama lokasi. Untuk menampung para pedagang kaki lima yang mengalami pengusuran atau pembongkaran. Serta, Pembeli mengungkapkan dilihat dari sektor informal belum terantisipasi dalam perencanaan tata ruang kota sebagai sarana & prasarana belum mendukung dengan adanya lahan untuk kegiatan pedagang kaki lima.

7. SYSTEM PENGAWASAN & PENGENDALIAN

Dalam penelitian ini mencoba mengetahui sejauh mana efektifitas penertiban pedagang kaki lima dengan adanya sistem pengawasan dan pengendalian tentunya menjadi aktifitas yang terlaksana menunjukan hasil yang kurang memuaskan baik kinerja maupun organisasi itu sendiri. Sehingga, pengawasan dan pengendalian dalam berupaya bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.

Dalam Wawancara dengan Key Informan ; Bapak Sayid Ali Selaku Camat Kebayoran Lama Pelaksanaan penertiban pedagang

kaki lima di pasar Kebayoran Lama yang ditanyakan Bagaimana tingkat efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Kebayoran Lama jika dilihat dari dimensi system pengawasan & pengendalian?

a. Dapat dilihat dari unsur system pengawasan & pengendalian dari program pemerintah Camat, Lurah dan Dinas UKM yang terencana adanya pembagian tugas kepada bawahan secara tertulis & lisan untuk berkoordinasi atau *stakeholder* kepada Satpol PP komunikasi yang dimanfaatkan melalui Hp atau Ht. Serta, adanya monitoring melalui media elektronik seperti alat komunikasi melalui atasan secara berjenjang.

Dan Wawancara dengan Informan ; Bapak Margiono Selaku Kepala Koordinasi Lapangan Satpol PP, yang ditanyakan Bagaimana tingkat efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Kebayoran Lama jika dilihat dari dimensi system pengawasan & pengendalian?

a. Dalam system pengawasan & pengendalian dilakukan absen , plotting yang dimaksudkan pembagian tugas yang

diberikan setelah pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima ada kegiatan penjagaan yang diawasi oleh koordinator lapangan sendiri dengan tim operasional serta adanya monitoring melalui media elektronik seperti alat komunikasi (Hp atau Ht) dan kontroling melalui atasan secara berjenjang.

Dan Wawancara dengan Informan : Bapak Yono Selaku pedagang kaki lima (PKL) dan Ibu Lisna Selaku Pembeli dipasar Kebayoran Lama, yang ditanyakan Bagaimana tingkat efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Kebayoran Lama jika dilihat dari dimensi system pengawasan & pengendalian?

- a. Penertiban yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya harus berdasarkan asas oportunitas yang sering kali penertiban yang dilakukan cenderung akan menimbulkan ketidakstabilan, anarkisme, dan ketidaktentraman didasarkan atas kepentingan masyarakat atau ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Serta, Pembeli mengungkapkan dirasa kurang maksimal salah satu tindakan yang dilakukan

untuk menuntut PKL agar mematuhi peraturan dan kebijakan atau perencanaan yang telah ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa peranan dan tantangan dalam efektifitas penertiban pedagang kaki lima di pasar Kebayoran Lama kota administrasi jakarta selatan sudah dinilai efektif dan baik. Hal ini didasarkan pada rumusan kesimpulan hal-hal sebagai berikut:

1. Efektivitas penertiban pedagang kaki lima di pasar Kebayoran Lama kota administrasi jakarta selatan efektif, hal ini dilihat dari harapan masyarakat wilayah sekitar pasar Kebayoran Lama yang menginginkan sepanjang jalan pasar Kebayoran Lama bersih, rapi dan nyaman. Terbukti dengan berjalannya proses perencanaan yang matang dan program waktu yang ditentukan untuk mengurangi kemacetan pada jam berdagang yang ditentukan. Ternyata pedagang kaki lima dinilai mengurangi kemacetan.

Sehingga dianggap sesuai dengan harapan masyarakat sekitar.

2. Efisiensi Ketertiban Umum Nomor 8 Tahun 2007 dalam penertiban pedagang kaki lima di pasar Kebayoran Lama. Jika dilihat dari sarana dan prasarana serta sumber daya aparat satpol pp dinilai kurang disetiap kecamatan karena belum memadai dengan jumlah kapasitas pedagang kaki lima yang berada di sepanjang area pasar Kebayoran Lama.
3. Kecukupan kinerja dari aparatur pemerintah maupun satpol pp telah dikatakan baik, hal ini dilihat walau masih ada kendala dijumlah petugas yang melakukan penertiban PKL selain dari jumlah kinerja yang berkualitas memadai sangat berpengaruh besar dalam proses kinerja.

Berdasarkan kepada rumusan kesimpulan yang telah diutarakan diatas dan berdasarkan temuan dari hasil penelitian dan observasi yang telah dilakukan penulis mengacu pada hasil kesimpulan, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penertiban yang dilakukan Satpol PP di pasar Kebayoran Lama yang didalam pelaksanaannya dapat bersikap tegas agar proses penertiban berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ketertiban umum pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 dan masyarakat dapat melakukan aktifitas dengan aman dan tertib.
2. Melihat terdapat hak-hak Pedagang Kaki Lima (PKL) ketika dilakukan pembongkaran, maka sebelum berlangsungnya penertiban terhadap PKL, Satpol PP atau aparatur pemerintah memperhatikan agar sebelumnya diberikan pemahaman dan sosialisasi secara mendalam terhadap semua peraturan daerah khususnya yang terkait dengan ketertiban dan keamanan lingkungan perlu adanya pendekatan secara persuasive.
3. Kinerja Satpol PP perlu ditingkatkan lagi dalam penertiban pedagang kaki lima di pasar Kebayoran Lama, hal ini dilihat masih ada beberapa pedagang kaki lima yang masih dibiarkan berdagang diluar waktu yang ditentukan. Sehingga,

menimbulkan ketidakadilan dengan pedagang lain dengan tambahan petugas lain yang mengawasi.

4. Dengan peraturan yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah DKI Jakarta beserta aparat pemerintah harusnya melakukan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan tersebut sebelum menerapkannya serta adanya alokasi yang disediakan sehingga tidak terjadi benturan terhadap para pedagang tersebut.
5. Mengingat hasil pembahasan menunjukan bahwa penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Pasar Kebayoran Lama Kota Jakarta

Selatan efektif, maka disarankan agar Satpol PP terus menerus secara melakukan sosialisasi baik dengan pedagang kaki lima dan peran masyarakat sekitar atas program-program kegiatan penertiban, agar para pedagang kaki lima dan masyarakat menyadari akan arti pentingnya ketertiban lingkungan, sehingga secara sukarela dan sadar para pedagang kaki lima dan masyarakat mendukung terhadap kegiatan yang dilakukan Satpol PP dan Aparatur Kecamatan dalam mengembalikan kembali hak fungsi lahan yang seharusnya dipergunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahmat, (2008), *Efektivitas Organisasi Edisi I*, Jakarta: Airlangga.

Angger Sigit Pramukti dan Meylani

Chahyaningsih, (2016), *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* : Pustaka Yustisia

S. P Siagian, (2010), *Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta

- Felix A. Nigro, dan L. Loyd G. Nigro, (2014), *Teori Administrasi Publik*,
Irra Chrisyanti Dewi, (2011), *Pengantar Ilmu Administrasi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Ivancevich M. John & Konopaske Robert, (2008), *Perilaku Dan Manajemen Organisasi (Jilid 1 Edisi7)*, Jakarta : Erlangga.
- Anggara. Sahya, (2012), *Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta : Pustaka Setia
- H.M Daryanto. (2013), *Administrasi dan Manajemen* , Jakarta : Rineka Cipta
- Robbins, Stephen P. & Judge, Timothy A. (2008), *Perilaku organisasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Terry, R. George dan Leslie W. Rue, (2011), *Dasar*
- Siagian S.P., (2016), *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Bumi Aksara
- _____, (2008), *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Balai Pustaka.
- Soewarno Handyaningrat, (2009), *Kepemimpinan (Leadership)*, Bandung : Karya Nusantara
- Soewarno Handyaningrat, (2011), *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Gunung Agung.
- Appley dan Oey Liang Lie (2008) *Perilaku Manajemen*, Jakarta : Salemba Empat
- Athoillah, Anton (2010), *Dasar-Dasar Manajemen Perkantoran*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Effendy, (2008), *Dinamika Komunikasi*, Bandung : PT. Remaja
- Suhartini, Arikunto, (2010), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta
- Sutarto, (2016), *Dasar-Dasar Organisasi*, Jakarta: GMUP Gadjah Mada University Press.
- Suwarno, (2013), *Administrasi Perkantoran*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suyadi Prawirosentono. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, BPFE Yogyakarta
- Syamsir Torang. Dr, (2013), *Manajemen dan Organisasi*, Jakarta : Al Fabeta CV
- T. Hani Handoko, (2008) *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia (Edisi 2)*, Jakarta, BPFE Yogyakarta
- Terry, R. George, (2008), *Asas-asas Management* terjemahan Winardi, Jakarta: Bumi Aksara
- The Liang Gie (2009), *Administrasi Perkantoran Modern*, Jakarta, Liberty
- Toha, Miftah, (2009), *Administrasi Materiil*, Jakarta, Rineka.
- Siagian S.P., (2011), *Manajemen Strategik*, Jakarta : Bumi Aksara
- Website :**

""katanye" kota kaki lima". Departemen Pekerjaan Umum PU-Net. Diakses tanggal 13 Desember.

<http://www.jakarta.go.id/v2/news/2010/08/Pengaturan-Tempat-dan-Pembinaan-Usaha-Mikro-Pedagang-Kaki-Lima-di-Provinsi-Daerah-Khusus-Ibukota-Jak>.

Diakses tanggal 23 September.

<http://www.scribd.com/doc/55974303/Pe-nerapan-Asas-Ketertiban-Umum>

<http://satpolpp.jakarta.go.id/upload/prod-ukhukum/PPTENTANG-SATUAN-POLISI-PAMONGPRAJA.pdf>

Lain – lain :

Arum Puspita Sunaryo. 2007. Efektivitas kantor pengelolaan pedagang kaki lima dalam pelaksanaan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat ii surakarta nomor 8 tahun 1995 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Skripsi <http://www.digilib.uns.ac.id> diakses tanggal 27 juli 2007